

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

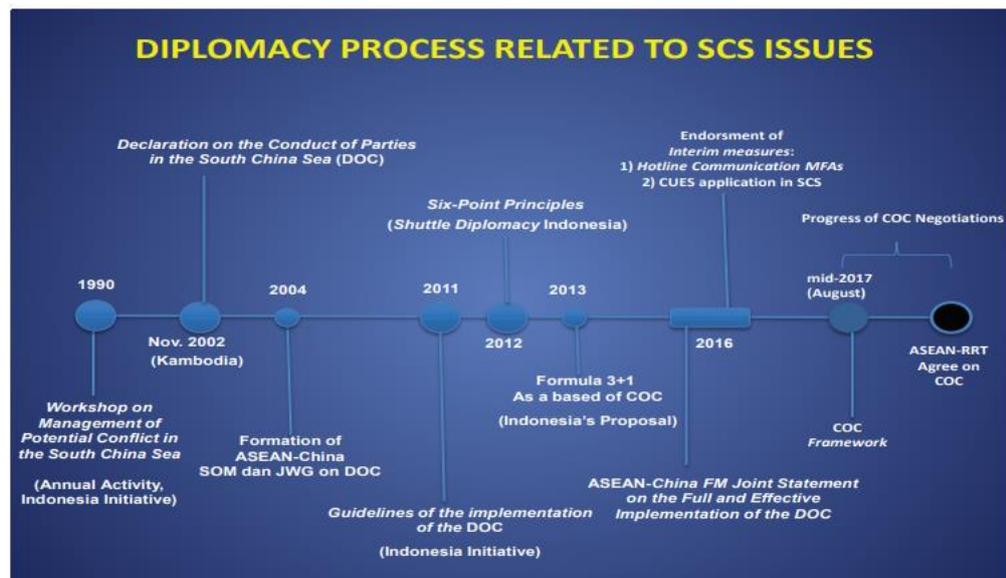
Hubungan internasional mempelajari masalah luar negeri dan masalah internasional negara-negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara, dengan karakteristik, pola, dan jenis hubungan yang berbeda (Hartanti, 2019). Seperti konflik yang terjadi dalam dua dekade terakhir yang terjadi di Laut Cina Selatan telah tumbuh dalam jumlah dan intensitas meskipun aktor negara terkait yang berbeda berkomunikasi secara ekstensif untuk menguranginya. Inti dari perselisihan adalah klaim maritim yang terutama mengadu China dengan beberapa negara disekitar laut China Selatan. Dengan lokasi yang strategis membuat negara China mengubah realitas Laut Cina Selatan secara fisik dan menghasilkan wacana yang semakin tegas untuk melegitimasi dan membuat klaim teritorial negara China benar dan membungkam klaim yang diajukan oleh pengklaim lainnya seperti pendapat Meyer dkk (2019).

Konflik tersebut berdampak juga bagi negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 menetapkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah zona laut yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis pangkal dari mana lebar Laut Teritorial diukur. Dasar hukum lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1983 mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) dan merupakan kelanjutan dari pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif pada 21 Maret 1980.

Indonesia sebagai negara yang tidak mengajukan klaim atas wilayah di perairan tersebut, tetapi ikut terganggu akibat adanya klaim sepihak dari Tiongkok. Tiongkok mengeluarkan peta yang dikenal dengan nine dash line pada

tahun 1993. Permasalahan peta ini tidak hanya berfokus pada pulau-pulau Spratly dan Paracel saja, melainkan berdampak pula bagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dari hal tersebutlah yang mendorong Indonesia berperan aktif dalam sengketa di wilayah Laut Cina Selatan ini. Dengan terganggunya utara kepulauan Natuna dalam sengketa ini maka akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia secara langsung dari hasil eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi yang berada di kawasan ZEE tersebut (Erwin,2014).

Berdasarkan alasan tersebut diatas membuat konflik Laut Cina Selatan semakin meluas dan berimplikasi pada isu-isu yang dianggap lebih krusial terkait kebijakan luar negeri antar negara. Adapun road map upaya yang telah dilakukan Indonesia selama ini adalah sebagai berikut (Toruan, 2020):



Sumber: (Wiranto dkk, 2017)

Berdasarkan *road map* tersebut menggambarkan tanggapan Indonesia menghadapi krisis yang terjadi di Laut China Selatan. Di kawasan Laut China Selatan, Indonesia berperan untuk mencegah eskalasi dan pecahnya sengketa tersebut. Jika dilihat secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, jika terjadi konflik di kawasan ini akan mengancam stabilitas kawasan dan Indonesia akan menerima pengaruh dari hal tersebut. Inilah mengapa

Indonesia berperan dalam penyelesaian sengketa terlepas dari faktor politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif” (Mulyadi, 2021).

Dalam praktiknya di era Presiden Joko Widodo itu menggunakan dengan ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) membantu dalam posisi geostrategis Indonesia dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah yang berpotensi menjadi konflik (Tandy dkk, 2021). Berbeda dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden sebelumnya, khususnya SBY yang berperan sebagai citra yang dimiliki Indonesia. Berbagai pihak mengkritik SBY karena hanya melakukan ekskursi ego tanpa hasil yang nyata (Arista, 2021).

Meskipun Negara China merupakan negara maju yang bersaing secara ekonomi, politik dan pertahanan dengan amerka serikat. Hal tersebut membuat konflik mampu memberikan dampak di Asia Tenggara secara ekonomi dalam bidang perdagangan karena hubungan kuat antara China dengan negara Asia lainnya. Dilema tersebut membuat China dan negara Asia Tenggara bimbang karena China menyebabkan berkurangnya perdagangan dan membuat negara asia tenggara berpindah ke pihak lain termasuk saingan negara China seperti Amerika Serikat. Sedangkan bagi negara Asia Tenggara mengurangi pendapatan dan produk import China. Menurut Murphy (2017), perselisihan ini sangat penting bagi AS, yang telah lama mempertahankan pengaruhnya di kawasan ini. Negara-negara Asia Tenggara yang ditempatkan di antara dua kekuatan ekonomi dan politik besar masih berusaha mempersempit kesenjangan antara kedua belah pihak guna mewujudkan manfaat dari pergeseran konflik ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Manoppo (2022) yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Merespon Konflik Di Laut China Selatan Di Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi”. Konflik Sengketa yang terjadi di Laut China selatan dan melibatkan berbagai negara di ASEAN dan China hingga sekarang belum menemui titik terang kapan berakhirnya konflik sengketa ini, tetapi Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi dari ASEAN dan juga menjalin

hubungan baik dengan China selalu berupaya menjadi penengah dalam konflik ini sebagai tujuan untuk menjaga perdamaian dunia.

Berdasarkan permasalahan, teori penjelasan dan penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik untuk meneliti yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Sengketa Laut Cina Selatan Di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Presiden Joko Widodo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Konflik Laut Cina Selatan yang bertujuan untuk mempertahankan daerah teritorinya.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi serta ilmu untuk memperkaya kajianteoretik dalam ilmu hubungan internasional khususnya mengenai teori Kebijakan Luar Negeri dalam Konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam memperkaya referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran Kebijakan Luar Negeri dalam Konflik Di Laut Cina Selatan bagi

masyarakat umum, serta dijadikan bukti penelitian yang diberikan kepada Universitas Muhamadiyah Yogyakarta prodi Hubungan Internasional.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Manoppo (2022) yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Merespon Konflik Di Laut China Selatan Di Masa Kepemimpinan Presiden Jokowi”. Konflik Sengketa yang terjadi di Laut China selatan dan melibatkan berbagai negara di ASEAN dan China hingga sekarang belum menemui titik terang kapan berakhirnya konflik sengketa ini, tetapi Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi dari ASEAN dan juga menjalin hubungan baik dengan China selalu berupaya menjadi penengah dalam konflik ini sebagai tujuan untuk menjaga perdamaian dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Dipua dkk (2021) yang berjudul “Sea Defense Strategy The Indonesian Navy In Dealing With The South China Sea Conflict”. Penelitian ini menyimpulkan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memprioritaskan second-track diplomacy dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, khususnya di wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga.

Sulaiman, Y. (2019) yang berjudul “What threat? Leadership, strategic culture, and Indonesian foreign policy in the South China Sea”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat underbalancing policy Indonesia dapat dijelaskan dengan budaya strategis Indonesia yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi guna menjaga stabilitas politik dalam negeri, dan membatasi presiden Indonesia silih berganti mengambil kebijakan yang lebih agresif dalam menghadapi ancaman China di Laut China Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Meyer dkk (2019) yang berjudul “Indonesia’s swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China’s claims in the South China Sea”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada

akhir tahun 2016, media Indonesia menggambarkan klaim China yang memiliki hak penangkapan ikan bersejarah di perairan NI sebagai ancaman keamanan nasional yang paling mendesak bagi Indonesia, yaitu masalah Kepulauan Natuna (NI) telah dikuritisasi. Analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menerima wacana keamanan Jakarta, yakni Jakarta berhasil mengamankan klaim China atas wilayah perairan Kepulauan Natuna (NI). Penelitian ini memberikan kontribusi baru pada literatur sekuritisasi dengan menganalisis berita dan media sosial Indonesia secara bersamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dipua dkk (2020) yang berjudul “An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia’s Perspectives, Contexts And Recommendations”. Hasil penelitian ini berupa: Pertama, menggali sejarah, filosofi dan pendekatan hukum dalam membahas latar belakang konflik. Kedua, menganalisis sikap dan cara pandang terhadap posisi strategis Indonesia di Laut Cina Selatan. Ketiga adalah mengusulkan beberapa kemungkinan rekomendasi yang dibutuhkan Indonesia untuk menyelesaikan konflik LCS dengan peran dan tindakan yang diperlukan untuk tujuan internasional dan regional. Indonesia sebagai *non-claimant* state memiliki peran diplomasi sebagai mediator, broker yang jujur, dan confidence builder dalam penanganan konflik Laut Cina Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmayanti (2014) yang berjudul “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)”. Berdasarkan temuan kajian ini, dinamika hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok mengalir dinamis sejak tahun 1950-an hingga terjalinnya kemitraan strategis pada tahun 2005. Fokus penelitian pada dua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. pertumbuhan hingga tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kerjasama di berbagai bidang mulai dari ekonomi, teknologi antariksa, budaya dan pariwisata, hingga keamanan dan pertahanan. Berbagai isu terus muncul di tengah ketatnya hubungan Indonesia dan China, namun tidak menjadi penghalang atau memiliki kemampuan untuk merugikan kedua negara.

E. Jangkauan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan konflik laut china selatan dengan pendekatan kebijakan luar negeri
2. Kebijakan yang diteliti kebijakan presiden SBY dan Jokowi
3. Tahun penelitian yang diteliti pada tahun 2009-2022

F. Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “Kebijakan” dan “Luar Negeri”. Kebijakan adalah pilihan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Luar Negeri” berarti segala sesuatu yang berada di luar negara dimana negara tidak memiliki kekuasaan atas wilayah atau orang yang tinggal di luar (Adnan, 2014). Jika kedua kata ini digabungkan maka dapat ditarik makna politik luar negeri yaitu pilihan untuk menyikapi segala sesuatu yang berada di luar suatu negara (Adnan, 2014). Gibson dalam penelitian Tamma (2021) juga mendefinisikan Kebijakan luar negeri sebagai rencana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang digunakan untuk memecahkan masalah negara dengan negara lain dan sebagian besar ditujukan untuk melindungi dan memajukan kepentingan negara.

Banyak negara anggota di kawasan Asia Pasifik telah menerapkan kebijakan luar negerinya masing-masing terkait di konflik Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menggunakan empat metode dalam langkah kebijakan Indonesia terkait sengketa Laut China Selatan. Empat pendekatan yang

ditempuh Presiden Joko Widodo terkait konflik ini adalah yang pertama dari pendekatan geopolitik dengan lahirnya Doktrin Poros Maritim Dunia. Kedua, pertahanan dan keamanan dilakukan dengan meningkatkan anggaran militer, terutama menambah dan mengganti alutsista. Ketiga, metode hukum dan politik yang digunakan selama proses penyelesaian, dan terakhir kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan memperluas perdagangan di kawasan Laut Cina Selatan (Sesa, 2021).

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang proaktif dan berprofil tinggi. Hal ini dicontohkan dengan kebijakan safari internasional SBY yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. SBY berusaha menunjukkan posisi Indonesia yang menonjol di dunia internasional dengan menggunakan bahasa “seribu teman nol musuh” (Widiatmaja dan Albab, 2019). Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia berada di lingkaran kedua, dengan negara-negara yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik dan Dialog Pasifik Barat Daya. Ada juga konsultasi trilateral yang melibatkan Indonesia, Australia, dan Timor Timur. Ada juga ASEAN+3 dalam lingkaran konsentris kedua ini, yang meliputi Jepang, Tiongkok (Tiongkok), dan Korea Selatan. Sedangkan lingkaran konsentris ketiga berkaitan dengan kolaborasi dengan kekuatan ekonomi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Di bawah SBY, Indonesia bertindak sebagai mediator dalam sengketa Laut China Selatan (LCS), selalu menyelesaikan konflik secara damai. Ia menyatakan dalam KTT ASEAN ke-24 di Myanmar bahwa Indonesia secara etis berkewajiban untuk berperan aktif dalam menyelesaikan ketegangan LCS. Dalam menangani masalah LCS, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian regional dan mencegah konfrontasi (Herwansyah, 2013).

Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, politik luar negeri Indonesia, jika tidak dibalik, berbeda jauh dengan SBY. Banyak pihak menilai Presiden Joko Widodo berpandangan ke dalam atau lebih mementingkan

dinamika dalam negeri. Gaya kepemimpinan Joko Widodo dipengaruhi oleh perbedaan latar belakangnya dengan SBY. SBY yang memiliki pengalaman militer serta pengalaman politik nasional dan internasional berbeda dengan Joko Widodo yang tidak mengenal forum internasional multilateral (Herwansyah, 2013).

Di era Jokowi, ada komitmen untuk bekerja sama dengan China dalam pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) yang dipimpin oleh China. AIIB merupakan lembaga keuangan internasional pimpinan China yang dibentuk khusus untuk pembiayaan infrastruktur. Secara lebih spesifik, AIIB didirikan sebagai bank khusus untuk mendukung inisiatif Silk Road China yang berfokus pada peningkatan hubungan di Asia, Timur Tengah, Afrika dan Eropa (Andika dan Aisyah, 2017).

Sementara itu, dalam sengketa Laut China Selatan (LCS), Indonesia di bawah Joko Widodo tidak memainkan peran kunci. Merosotnya pengaruh Indonesia di ASEAN dalam isu LCS telah meningkatkan ketegangan regional. Pendirian fasilitas militer Cina di Laut Cina Selatan, diikuti oleh Indonesia melakukan hal yang sama di Natuna, menunjukkan bahwa sistem ASEAN tidak berfungsi. Kenyataannya, Joko Widodo memiliki gaya kepemimpinan yang lebih fokus ke dalam negeri (berwawasan ke dalam) (Connelly, 2016).

2. Teori Peran Individu

Mengenai Teori peran individu dalam keputusan kebijakan luar negeri merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana tokoh-tokoh penting atau pemimpin negara dapat mempengaruhi dan membentuk kebijakan luar negeri suatu negara (Hadiwinata, 2017). Teori ini menekankan peran individu dalam proses pembuatan keputusan kebijakan luar negeri, yang bisa sangat berpengaruh terhadap arah dan tujuan kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa perspektif utama mengenai peran individu dalam keputusan kebijakan luar negeri (Salamun, 2021):

1. Realisme Mewakili Pemimpin, Pendekatan ini menganggap bahwa pemimpin negara adalah aktor utama dalam kebijakan luar negeri dan bahwa keputusan-keputusan dibuat berdasarkan pada kepentingan nasional dan keamanan negara. Pemimpin dipandang sebagai tokoh yang rasional dan pragmatis dalam melindungi kepentingan negara, dan tindakan mereka dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri.
2. Kepemimpinan Transformasional, Teori ini berfokus pada peran pemimpin dalam mengubah paradigma dan tujuan kebijakan luar negeri negara. Pemimpin dengan visi yang kuat dapat mengubah pandangan negara terhadap hubungan internasional, mempromosikan kerja sama global, atau merombak strategi pencucian yang ada.
3. Peran Karismatik, Teori ini mengakui peran individu karismatik yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pemimpin dengan kepribadian yang kuat dan karisma tinggi dapat membentuk opini publik dan mendorong tindakan yang berbeda dari norma sebelumnya.
4. Pengaruh Kelompok Kementingan, Meskipun lebih fokus pada aktor kolektif, teori ini juga mengakui peran individu dalam memimpin atau mengarahkan kepentingan kelompok-kelompok yang mempengaruhi kebijakan di luar negeri. Individu dalam posisi penting dapat menjadi pendorong bagi kelompok-kelompok ini.
5. Pemimpin Psikologi, Pendekatan ini mencoba memahami bagaimana karakteristik psikologis pemimpin, seperti sikap, nilai, kepercayaan, dan emosi, dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Misalnya, persepsi pemimpin terhadap ancaman atau peluang dapat memengaruhi keputusan yang diambil.
6. Biografi dan Pengalaman Pribadi, Pengalaman masa lalu dan latar belakang individu dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan pendekatan mereka terhadap kebijakan luar negeri. Pemimpin yang memiliki pengalaman langsung dengan konflik atau diplomasi internasional dapat memiliki pandangan yang lebih unik dan nuansawan.

Namun, penting untuk diingat bahwa individu peran dalam keputusan kebijakan luar negeri seringkali tidak berdiri sendiri. Keputusan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, kontekstual, dan institusional. Dalam banyak kasus, pengaruh individu mungkin berinteraksi dengan kondisi struktural dan institusional untuk membentuk kebijakan luar negeri yang akhirnya diambil oleh negara.

Dalam keduanya, baik SBY maupun Jokowi menyembunyikan diplomasi nilai-nilai, penyelesaian damai, dan penghormatan terhadap hukum internasional dalam menangani isu Laut China Selatan. Meskipun Indonesia bukanlah pihak yang secara langsung menentang hal tersebut, negara ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah Asia Tenggara melalui pendekatan perubahan dan diplomasi yang cermat.

G. Hipotesis

Dalam mengkaji sengketa LCS, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo memiliki perbedaan kebijakan. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kebijakan luar negeri yang lebih aktif, hal ini dapat dilihat dari aktifnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengikuti forum-forum Internasional. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan citranya di dunia internasional. Hal ini selaras dengan kebijakan luar negeri yang disuarakannya yaitu “seribu teman dan nol musuh”. Sehingga dalam sengketa Laut China Selatan Indonesia era SBY mampu menjadi mediator untuk mendamaikan sengketa tersebut. Sementara, kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon sengketa LCS lebih pasif dibandingkan presiden sebelumnya. Yang mana, Presiden Joko Widodo tidak terlalu aktif dalam forum-forum Internasional yang menangani sengketa tersebut. Presiden Joko Widodo dalam kebijakan luar negerinya lebih mementingkan kepentingan nasional negaranya.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan adalah studi Pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kebijakan Luar Negeri, dan Konflik Laut China Selatan dengan negara China di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi adalah dengan menggunakan studi pustaka. Metode studi pustaka atau studi literature adalah mengumpulkan informasi dari buku-buku dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah dan tujuan riset. Buku-buku dan literatur lain adalah sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan untuk mendapatkan informasi/keterangan yang bersifat teoritis (Zagoto dkk, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan rujukan peneliti berupa jurnal, majalah, Koran, buku maupun internet.

a. Teknik Analisis Data

Model analisis ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2004).

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah sekunder yang merupakan dari jurnal, buku dan majalah.

c. Variabel

Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah konflik di Laut Cina Selatan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kebijakan Luar Negeri di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan Joko Widodo.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami laporan ini, maka isi dari laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum Sengketa Laut Cina Selatan

Berisi tentang pembahasan gambaran umum Sengketa Laut Cina Selatan, keterlibatan ASEAN dalam menanggapi sengketa Laut China Selatan dan Keterlibatan Indonesia dengan Sengketa Laut Cina Selatan.

BAB III Perbedaan Kebijakan Indonesia Era SBY dan Jokowi Menanggapi Sengketa Laut China Selatan

Berisi tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era SBY, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi dan Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era SBY dengan Jokowi

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan yang mencakup poin-poin penting mengenai pembahasan masalah yang telah dipaparkan secara lebih ringkas.